

---

# PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APLIKASI E-OFFICE ASN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SUMEDANG

Deden Haria Garmana<sup>1\*</sup>, Fuji Dwi Maisyaroh<sup>2</sup>, Asep Saiful Muhtadi<sup>3</sup>, Dea Siti Nureza<sup>4</sup>,  
Resthi Fatchinnafis<sup>5</sup>, Yordian Nugraha<sup>6</sup>, Zia Nurazizah<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Universitas Sebelas April

---

## Article Info

### Article history:

Received Sept 12, 2024

Revised Des 12, 2024

Accepted Des 18, 2024

---

### Keywords:

Public Administration

Public Policy

Public Policy Implementation

Work Effectiveness

E-office

---

## ABSTRACT

*Relationship between the Implementation of ASN E-Office Policy and the Work Effectiveness of Employees in the Communications and Information, Coding and Statistics Services, Sumedang Regency. The method used in preparing Administrative Research Practices (PPA) is a descriptive analysis method. This research variable uses variables that will be measured from an independent variable of policy implementation and a dependent variable of employee work effectiveness. What was used as a population for this researcher were all ASN employees in the Sumedang Regency Communication and Informatics, Coding and Statistics Service, totaling 35 employees and a sample of 35 people was taken. The method used is literature study, field study (questionnaire, observation). Based on the results of implementation research, the effect of policy implementation is 87.4% (very good) of the ideal criteria with a total score of 1531, and employee work effectiveness is 86.4% (very good) of the ideal criteria with a total score of 1513, the relationship between policy implementation and Work Effectiveness Employees are at a very good correlation level with a correlation coefficient of 0.834. And the influence of policy implementation on the work effectiveness of employees at the Sumedang Regency Communication and Informatics, Coding and Statistics Service obtained a coefficient of determination value of 69.5%, while the side of 30.5% was influenced by other factors that were not examined (epilson factors).*



Copyright © 2024 JRPA. All rights reserved.

---

## Corresponding Author:

Deden Haria Garmana

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jln. Angkrek Situ No 19 Kelurahan Situ - Sumedang

Email: [deden.haria@gmail.com](mailto:deden.haria@gmail.com)

---

## 1. INTRODUCTION

Pemerintah daerah merupakan salah satu alat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu Daerah yang lebih kecil dari sebuah Negara di mana Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang wilayahnya terbagi atas Daerah-daerah Provinsi. Kemudian daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, Daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah sendiri yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, Kabupaten Sumedang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. Kabupaten Sumedang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 26 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 270 Desa serta terdiri dari 36 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik. Dinas komunikasi dan informatika, persandian dan statistik sesuai dengan Perbup No 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten Sumedang.

Dinas komunikasi dan informatika, persandian dan statistik mempunyai fungsi mengkoordinasikan dan pembinaan Operasional Perangkat Daerah (OPD) dan melaksanakan tugas lain dari kepala daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dinas komunikasi dan informatika persandian dan statistik memiliki 5 (lima) bidang yaitu bidang komunikasi, bidang statistik, bidang persandian, bidang kesekretariatan, dan bidang informatika. Dari ke-Lima bidang di Dinas komunikasi dan informatika persandian dan statistik, bidang Informatika inilah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Sumedang.

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing tinggi. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Kompetensi teknis Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan dimiliki oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) karena ASN menjadi kunci utama perbaikan birokrasi dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah "warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu untuk menduduki jabatan pemerintahan".

Dalam Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik di dukung dengan teknologi informasi pada dinas tersebut yaitu diterapkannya sistem *E-Government*. *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi dalam ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan, *E-Government* diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan maksud agar tumbuh kepercayaan masyarakat. *E-Government* yaitu pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka mencapai tujuan, antara lain : menjadikan pemerintah lebih bertanggung jawab dan transparansi kepada masyarakat, memberi akses informasi kepada publik secara luas, dan untuk meningkatkan efisiensi ke pemerintahan. Kebijakan dan strategi rasional pengembangan *e-government* tercantum dalam Instruktur Presiden Nomor 3 Tahun 2003 kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dan keputusan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing yang bertujuan untuk mengembangkan *e-government*. Contoh *E-Government* diantaranya : *E-Office* (sebagai sistem informasi manajemen arsip dan persuratan daerah), *E-Pangan* (Sistem informasi manajemen harga pangan pokok), *E-Planning* (Sistem informasi manajemen perencanaan), *E-Budgeting* (Sistem informasi manajemen penyusunan anggaran). Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dapat dilihat dengan digunakannya aplikasi *E-Office* yang dimiliki oleh seluruh pegawainya.

*E-Office (Elektronik Office)* adalah salah satu penerapan dari penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan ASN dalam tata kelola kegiatan sehari-harinya. Sebagai salah satu hasil perkembangan *E-Office* tentunya akan membantu pegawai, baik di kantor, organisasi pemerintah dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik dan tepat waktu. Tidak hanya untuk pegawai, bagi pemimpin juga akan ikut menikmati

hasilnya seperti laporan yang dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu berdasarkan data terpadu yang digunakan di dalam sistem *E-Office*.

Sistem *E-office* sendiri selain untuk meminimalisasi penggunaan kertas, *E-Office* juga bermanfaat untuk mempermudah penyimpanan data dan pengelola data di dalam suatu kantor karena data tersebut menjadi terpusat (*centralized*) dengan bantuan database, sehingga data yang sudah disimpan akan saling terhubung menjadi satu sehingga dapat memberikan informasi bagi kantor tersebut. Selain data, tentunya penggunaan komputer bagi para pegawai juga sepenuhnya dibutuhkan demi terciptanya sistem *E-Office*.

Implementasi kebijakan *E-Office* berhubungan dengan keefektifan kerja pegawai. Implementasi kebijakan *E-Office* merupakan suatu faktor penunjang terhadap efektifnya kerja pegawai. Implementasi *e-office* juga didukung dengan kebijakan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penggunaan dan pengelolaan perencanaan berbasis elektronik/*e-planning*.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, peneliti menemukan indikasi-indikasi yang mengarah terhadap efektivitas kerja pegawai belum mencapai taraf yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikasi-indikasi sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia, hal ini dibuktikan dengan kurangnya tenaga ahli dan kemampuan pengelola *E-Office* Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Terjadinya hambatan dalam mengakses aplikasi *E-Office* yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam menerima dan mengirim dokumen ataupun surat.
3. Masalah teknis dalam penggunaan jaringan yang masih menjadi penghambat bagi pegawai sehingga memengaruhi efektif kerja pegawai.
4. Notifikasi, hal ini dibuktikan dari beberapa keluhan pegawai yang terkadang tidak mendapatkan notifikasi dari *E-Office* sehingga menghambat kinerja pegawai terutama saat menerima dokumen yang harus segera diselesaikan.

## 2. METHOD

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian, dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

Adapun pengertian dari metode penelitian deskriptif menurut Sugyono (2017) sebagai berikut: Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Suharsimi Arikunto (2013) bahwa “ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.

Untuk mempermudah pemahaman selanjutnya, maka peneliti menguraikan operasionalisasi variabel pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Bebas (X) Implementasi Kebijakan**

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Item
Implementasi Kebijakan Variabel (X) Menurut George C. Edward III (2014: 61-62)	1. Komunikasi	a. Tepat Sasaran	1
		b. Kejelasan Komunikasi	2
		c. Sosialisasi	3
	2. Sumber Daya	a. Pelatihan	4
		b. Adanya anggaran	5
		c. Sarana prasarana	6
	3. Disposisi	a. Disiplin	7
		b. Komitmen	8
	4. Struktur Birokrasi	a. Standar Operasional Prosedur (SOP)	9
		b. Spesialisasi kerja sesuai dengan keahliannya.	10

**Tabel 1 Operasionalisasi Variable Terikat (Y)Efektivitas Kerja**

Variabel	Dimensi	Indikator	Item
Efektivitas Kerja Variabel (Y) Menurut Richard M. Steers (dalam Ambia, 2018:218)	1. Karakteristik Organisasi	a. Komitemen	11
		b. Kerjasama Tim	12
	2. Karakteristik Lingkungan	a. Lingkungan Eksternal	13
		b. Lingkungan Internal	14
	3. Karakteristik Pekerja	a. Kejelasan Tugas	15
		b. Displin Kerja	16
	4. Kebijakan dan Praktek Manajemen	a. Proses Komunikasi	17
		b. Pelatihan dan Pengembangan	18
c. Kompensasi Yang Adil		19	
d. Inovasi		20	

Adapun yang dijadikan populasi penelitian dalam penelitian ini adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang berjumlah 35 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling yaitu sampling jenuh. (Sugiyono:2017) mengemukakan bahwa “Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel.

Untuk mengetahui tingkat Implementasi Kebijakan Aplikasi *E-Office* ASN dan Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik di Kabupaten Sumedang, maka dilakukan pengukuran terhadap item pernyataan dari indikator-indikator variabel Implementasi Kebijakan Aplikasi *E-Office* ASN dan Efektivitas Kerja .

Adapun rumus yang digunakan adalah rumus korelasi *product moment* yaitu sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum x) (\sum y)}{\sqrt{\{(n \sum x^2 - (\sum x)^2) (n \sum y^2 - (\sum y)^2)\}}}$$

(Sugiyono, 2017: 212)

Hasil angket yang terkumpul diberi skor sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, sehingga diperoleh data yang menggambarkan sejauhmana tingkat Implementasi Kebijakan Aplikasi *E-Office* ASN dan Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik di Kabupaten Sumedang.

### 3. RESULTS AND DISCUSSION

Untuk mengetahui gambaran variabel implmentasi Kebijakan di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, maka dilakukan pengkuran dengan menggunakan kuesioner yang masing-masing disertai lima alternatif jawaban yang harus dipilih sesuai dengan pendapat responden. Adapun kriteria penelian presentase sebagai berikut:

1. Nilai kumulatif adalah jumlah nilai dari setiap item pertanyaan yang merupakan jawaban dari 35 responden.
2. Persentase adalah nilai kumulatif dibagi dengan nilai maksimum dikalikan 100%.
3. Jumlah responden = 35 orang dan nilai skala pengukuran terbesar = 5, sedangkan skala pengukuiuran terkecil = 1, sehingga diperoleh jumlah kumulatif nilai terbesar = 35 x 5 = 175 dan jumlah nilai kumulatif terkecil 35 x 1 = 35. Adapun nilai persentase terbesar adalah (175/175) x 100% = 100% dan nilai persentase terkecil adalah (35/175) x 100% = 20% dari kedua persentase tersebut tersebut diperoleh nilai rentan yaitu sebesar 100% - 20% = 80%. Jika dibagi dengan 5 skala pengukuran di dapat nilai interval presentase sebesar (80% / 5) = 16%. Maka dari itu diperoleh klasifikasi kriteria penelian sebagai berikut.

**Tabel 4. Kriteria Penelian Berdasarkan Presentase**

No	Presentase	Kriteria Penilain
1.	20 – 35,99	Sangat Tidak Baik
2.	36 – 51,99	Tidak Baik
3.	52 – 67,99	Cukup
4.	68 – 83,99	Baik
5.	84 – 100	Sangat Baik

Untuk mengetahui seberapa baik variabel implementasi kebijakan di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, maka dilakukan pengukuran menggunakan angket yang terdiri dari 10 pernyataan yang masing-masing disertai lima alternatif jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai responde. Hasil pengolahan data terhadap 10 pernyataan dari variabel implmentasi kebijakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Implementasi Kebijakan Aplikasi E-Office ASN**

No.	Indikator	Skor ideal	Jumlah kumulatif	Presentase (%)	Kriteria
1.	Pelaksanaan E-Office ASN telah dilakukan tepat sasaran sesuai dengan tujuan E-Office ASN	175	165	93,7%	Sangat Baik
2.	Adanya Kejelasan Komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi mengenai E-Office ASN	175	154	88%	Sangat Baik
3.	Terlaksananya sosialisasi terhadap Pegawai untuk memahami penggunaan E-Office ASN dengan baik	175	156	89,1%	Sangat Baik
4.	Pegawai melakukan pelatihan untuk memahami penggunaan E-Office ASN dengan baik	175	149	85,1%	Sangat Baik
5.	Adanya anggaran yang diberikan Pemerintah/Instansi terkait memberikan bantuan khusus baik secara materi maupun imateri dalam melaksanakan kebijakan E-Office ASN.	175	142	81,1%	Baik
6.	Adanya sarana prasarana yang memadai untuk menunjang penggunaan E-Office ASN	175	150	85,7%	Sangat Baik
7.	Adanya sarana prasarana yang memadai untuk menunjang penggunaan E-Office ASN	175	154	88%	Sangat Baik
8.	Pegawai memiliki komitmen yang tinggi terhadap peraturan dan pedoman penggunaan E-Office ASN	175	156	87,4%	Sangat Baik
9.	Ketersediaan SOP sangat mendukung implementasi E-Office ASN	175	152	86,9%	Sangat Baik
10.	Ketersediaan Spesialisasi kerja sesuai dengan keahliannya di DISKOMINFOSANDITIK sangat memadai dalam penggunaan E-Office	175	156	89,1%	Sangat Baik
<b>Jumlah</b>		<b>1750</b>	<b>1531</b>		

Untuk mengetahui seberapa baik variabel Efektivitas Kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, maka dilakukan pengukuran menggunakan angket yang terdiri dari 10 pernyataan yang masing-masing disertai lima alternatif jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai responde. Hasil pengolahan data terhadap 10 pernyataan dari variabel implmentasi kebijakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 6. Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Efektivitas Kerja**

No.	Indikator	Skor ideal	Jumlah kumulatif	Presentase (%)	Kriteria
1.	Mampu memiliki komitmen, sehingga pekerjaan dapat lebih optimal.	175	157	89,7%	Sangat Baik
2.	Mampu melakukan kerja sama tim dengan baik selama melaksanakan tugas dan kewajiban.	175	152	86,8%	Sangat Baik
3.	Adanya dukungan dari lingkuan <i>External</i> untuk memotivasi kerja pegawai.	175	144	82,9%	Baik
4.	Adanya dukungan dari lingkungan <i>internal</i> untuk memotivasi kerja pegawai	175	153	87,4%	Sangat Baik
5.	Adanya kejelasan tugas yang diberikan kepada seluruh pegawai	175	156	89,1%	Sangat Baik
6.	Adanya sikap disiplin kerja dan selalu mengikuti standar operasional prosedur dalam bekerja.	175	153	87,4%	Sangat Baik
7.	Terjadinya proses komunikasi yang baik antara pegawai di lingkungan kerja	175	153	87,4%	Sangat Baik
8.	Diberikannya pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai	175	151	86,9%	Sangat Baik
9.	Adanya kompensasi yang adil bagi pegawai sebagai motivasi kerja.	175	143	81,7%	Baik
10.	Mampu melakukan inovasi untuk memberikan kemajuan dan meningkatkan kualitas bagi instansi	175	151	86,9%	Sangat Baik
<b>Jumlah</b>		<b>1750</b>	<b>1513</b>		

**Hubungan Variabel Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Kerja Pegawai Uji Normalitas**

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data dari variabel terikat maupun variabel bebas tersebut normal atau tidak. Uji normalitas data akan dilakukan dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorv-Smirnov Test (KS-Z) SPSS for Windows*. Adapun hasilnya sebagai berikut :

**Tabel 7. Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	Variabel X Implementasi Kebijakan	Variabel Y Efektivitas Kerja
N	35	35

Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	43.74	43.23
	Std. Deviation	4.636	4.929
Most Extreme Differences	Absolute	.115	.189
	Positive	.104	.189
	Negative	-.115	-.119
Test Statistic		.115	.189
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>	.003 <sup>c</sup>

Sumber : hasil penelitian spss 26.

Berdasarkan gambar di atas, kaidah yang digunakan untuk mengetahui normal tidaknya sebaran adalah dengan melihat nilai probabilitas/signifikansi > 0,05 maka data diasumsikan berdistribusi normal. Karena hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilainya 0,200 untuk variabel implementasi kebijakan untuk variabel efektivitas kerja 0,003 yang artinya lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan berdistribusi normal.

**Tabel 8. Uji Koefisien Korelasi**

Correlations			
		Variabel X Implementasi Kebijakan	Variabel Y Efektivitas Kerja
Variabel X Implementasi Kebijakan	Pearson Correlation	1	.834**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	35	35
Variabel Y Efektivitas Kerja	Pearson Correlation	.834**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	35	35

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 26.

Berdasarkan gambar di atas, nilai koefisien korelasinya 0,834 atau terdapat hubungan antara variabel implementasi kebijakan dan variabel efektivitas kerja pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang yang termasuk kedalam kategori baik karena 0,834 berada pada interval 0,68-83,99 pada tabel pedoman interpretasi koefisien korelasi (Sugiyono, 2011:214).

Untuk mengetahui korelasi kedua variabel tersebut signifikan atau tidak, maka digunakan uji signifikan dengan menggunakan rumus  $t_{hitung}$  sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Selanjutnya nilai  $t_{hitung}$  didistribusikan kedalam rumus tersebut, sehingga diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0,834\sqrt{35-2}}{\sqrt{1-0,834^2}}$$

$$t_{hitung} = \frac{4,7909652472}{0,5517644425}$$

$$t_{hitung} = 8,682$$

Dengan tingkat signifikansi 5% dan  $dk = n - 2 = 35 - 2 = 33$ , maka diperoleh harga  $t_{tabel}$  di cari pada tabel, didapat 2,035

$t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

$t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Maka perhitungan menunjukkan  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  atau  $8,682 > 2,035$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara implementasi kebijakan dengan efektivitas kerja pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik di Kabupaten Sumedang.

### Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui pengaruh variabel implementasi kebijakan terhadap efektivitas kerja pegawai menggunakan rumus koefisien determinasi Riduwan & Akdon, 2015: 125)

Keterangan :

$KD$  = Koefisien Determinasi

$r^2$  = Kuadrat Korelasi Variabel Bebas dan Terikat

Sehingga diperoleh :

$$Kd = 0,834^2 \times 100\%$$

$$= 0,695556 \times 100\%$$

= 69,5%

**Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.834 <sup>a</sup>	.696	.686	2.76010
a. Predictors: (Constant), Implmentasi Kebijakan X				

Sumber: Hasil Penelitian SPSS 26.

Dari formulasi tersebut maka korelasi antara Implementasi Kebijakan (X) dan Efektivitas Kerja (Y) maka diperoleh KD = 69,5%. Hal ini mengandung bahwa Implementasi Kebijakan Pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik di Kabupaten Sumedang di pengaruhi oleh Efektivitas Kerja Pegawai sebesar 69,5% sedangkan sisinya sebesar 30,5% dipengaruhi oleh factor-faktor lain diluar penelitian (*factor epsilon*).

Dari hasil pengelolaan Kuesioner Variabel Implmentasi Kebijakan *E-Office* ASN, terlihat bahwa untuk mengetahui seberapa baiak implmentasi kebijakan *E-Office* ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, maka dilakukan perhitungan prosesntase sebagai berikut:

$$\frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

$$\frac{1531}{1750} \times 100\% = 87,4\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat diketahui persentase variabel Implmentasi Kebijakan Aplikasi *E-Office* ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang sudah berada pada kriteria Sangat Baik dengan hasil analisis 87,4%.

Dengan demikian, berarti implmentasi kebijakan *E-Office* ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, sudah dapat dilaksanakan dengan baik, hal terssebut sesuai dengan teori George C. Edward (dalam Tahir, 2014:61) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber daya
- 3) Disposisi
- 4) Struktur Birokrasi

Secara empiris, dari hasil penelitian diatas dipahami bahwa terdapat hal yang sangat mendukung terhadap variabel Implementasi Kebijakan *E-Office* ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, yakni **“Tepat Sasaran”** dimana item atau indikator tersebut memiliki nilai sebesar yaitu 93,7% dari responden. Hal tersebut berarti bahwa tepat sasaran dalam pelaksanaan implementasi kebijakan *E-Office* ASN yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang sudah sesuai dengan teori yang telah di sampaikan oleh George C Edward (dalam Tahir, 2014:61) yaitu Komunikasi. Adapun Komunikasi terssebut berupa Pelaksanaan *E-Office* ASN telah dilakukan tepat sasaran sesuai dengan tujuan *E-Office* ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

Akan tetapi, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa adanya hal yang belum menunjang terhadap Implementasi Kebijakan *E-Office* ASN yaitu **“Adanya Anggaran”**. Hal ini dapat dilihat dari presentase jawaban dari responden yang memberikan penilaian terhadap item atau indikator tersebut sebesar 81,1%. Hal ini dikarenakan kurangnya mendapatkan biaya anggaran yang sesuai dengan prosedur yang berlaku di Dinas Komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

#### 4. CONCLUSION

Implementasi Implementasi kebijakan di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dapat dikatakan sangat baik. Hal ini diperoleh berdasarkan pada hasil perhitungan total skor angket yang mencapai 87,4% (kriteria sangat baik) Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dapat dikatakan sangat baik. Hal Ini diperoleh berdasarkan hasil perhitungan total skor angket yang mencapai 86.4% (kriteria sangat baik). Terdapat

hubungan yang kuat antara Implementasi kebijakan dengan efektivitas kerja pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang terbukti dengan hasil Koefisien korelasi sebesar  $r = 0,834$

## REFERENCES

- Abdurrohim, A. (2021). Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. *Repository FISIP UNSAP*, 20.
- Admosoeprapto. (2016). *Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Areros.
- Akadun. (2011). *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Akadun . (2019). *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Ambia. (2018). Pengaruh efektivitas kerja pegawai terhadap kualitas. *Universitas Dharmawangsa*.
- Anggara. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Busra. (2013). Perlunya Aplikasi E-Office Sebagai Dukungan Penerapan Reformasi Birokrasi. *Widyaiswara Muda*, 5-8
- Hasibuan. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indriardi. (2016). *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi*. Malang: CV.Sofa Mandiri.
- Keban. (2004). *Strategi Administrasi Negara*. Jakarta: Gava Media.
- Mahardika, F. d. (2023). Manajemen Risiko Teknologi Informasi Aplikasi E-Office ASN Menggunakan ISO 31000.2018. *Infotekmesin*, 237-243.
- Mulyadi. (2016). *Implementasi Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Narsen, N. (2022). Penerapan dan Pemanfaatan Electronic Office Pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Salatiga. *Doctoral Dissertation*
- Nurafifah, S. (2021). Pengaruh Pengelolaan Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Di Kecamatan Sumedang Utara . *Repository FISIP UNSAP*.
- Pasolog, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ridwan, A. (2006). *Rumus dan data dalam aplikasi statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Rukajat. (2018). *Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Solomon.
- Rodiyah, d. (2021). *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik*. Umsida Pers.
- Romdloni. (2017). Manajemen Personalialia sebagai Upaya dalam Meningkatkan Kualitas Personalialia . *Manajemen Personalialia sebagai Upaya dalam Meningkatkan Kualitas Personalialia* , 64-89.
- Sahya, A. &. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori Dan Praktik*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Septiadi, R. (2017). Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai Pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika dan Parawisata Kota Banjar. *UNPAS*, 25.
- Setiawan. (2016). *Penerapan prinsip-prinsip Good Governance*.
- Silalahi. (2011). *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Kencana.
- Syafiie, I. K. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka cipta.
- Terry. (2021). *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi*. Bumi aksara.
- Umam, K. (2011). *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Vanesha, V. (2019). Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. *FISIP UNPAS*, 23.
- Yuniawati, F. I. (2023). City Branding Kabupaten Sumedang Melalui Program Sumedang Happy Region . *Comdent Communication Student Jurnal*, 30-45.